

Abstrak

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban APBN melalui penyajian laporan keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh BPK disebutkan pemerintah dengan konsisten selalu berupaya melakukan peningkatan pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada peningkatan kualitas LKPP. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dengan meningkatkan mutu pengelolaan serta *reliability* penyajian aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan mengetahui kendala yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Pasaman secara umum telah sesuai dengan SAP dalam hal pengklasifikasian dan penyusutan aset tetap. Sementara itu, berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran awal aset tetap masih terdapat ketidaksesuaian seperti bertambahnya luas tanah namun tidak memiliki nilai perolehan. Hal ini sejalan dengan belum sesuainya penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yaitu nilai yang tersaji antara laporan Barang Milik Negara berbeda dengan laporan keuangan, tidak diungkapkannya nilai perolehan aset tetap tanah yang mengalami kenaikan luas, dan informasi terkait kapitalisasi masih menggunakan aturan lama. Kendala yang dialami terkait pengelolaan aset tetap umumnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum optimal.

Kata kunci: Akuntansi aset tetap, Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Standar Akuntansi Pemerintah

Abstract

In the implementation of state financial management, the government is required to carry out APBN accountability through the presentation of financial reports. Based on the inspection report (LHP) on the Central Government Financial Statements (LKPP) by the BPK, it is stated that the government consistently strives to improve state financial management which has an impact on improving the quality of LKPP. One of the efforts made is to improve the quality of the financial reports of state ministries/agencies by increasing the quality of management and the reliability of the presentation of fixed assets. This study aims to determine the conformity of the application of fixed asset accounting with Government Accounting Standards (SAP) and to find out the existing constraints related to the application of fixed asset accounting at the Ministry of Religion, Pasaman Regency. The method used in this study is a qualitative method by examining theories related to fixed asset accounting. The data collection method used is through the method of literature and interviews. The results showed that the application of fixed asset accounting at the Ministry of Religion of Pasaman Regency was generally in accordance with the SAP in terms of classifying and depreciating fixed assets. Meanwhile, with regard to the initial recognition and measurement of fixed assets, there are still discrepancies such as an increase in land area but no acquisition value. This is in line with the inappropriate presentation and disclosure of fixed assets at the Ministry of Religion of Pasaman Regency, namely the value presented between the State Property Report is different from the financial statements, the non-disclosure of the acquisition value of land fixed assets has increased in area, and information related to capitalization still uses the old rules. . Constraints experienced related to the management of fixed assets are generally related to human resources that are not yet optimal.

Keywords: Accounting for fixed assets, Ministry of Religion, Pasaman Regency, Government Accounting Standards